

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dimungkinkan dilakukan perubahan APBD dikarenakan adanya perubahan asumsi-asumsi pada saat penyusunan APBD. Untuk melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2021, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan menyampaikan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk dibahas dan disetujui sebagai acuan dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2021.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021 dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman kebijakan anggaran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana anggaran program dan kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan dokumen Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, ini adalah :

1. Menetapkan prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan pada SKPD berdasarkan prioritas penanganan Isu Strategis Daerah;
2. Mengembangkan Skenario Prioritas daerah yang berbasis pada prioritas-prioritas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Papua untuk memastikan pencapaian target **PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN;**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021**

3. Menyesuaikan perubahan prediksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah;
4. Adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2020 berdasarkan hasil Audit BPK RI Perwakilan Papua atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020;
Mengembangkan skenario efisiensi dan efektivitas Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021;
5. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah, dengan melakukan Refocusing dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah, dampak dari Pandemi COVID-19;
6. Menciptakan acuan arah kebijakan seluruh pelaku pembangunan daerah, dan Pelaksanaan PON XX Tahun 2021 dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
7. Memberikan pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun 2021;

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum yang menjadi pijakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2021, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
5. Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021**

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang – Undang RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021**

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149)
24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Gubernur Papua Nomor 68 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2021;

BAB II

RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan pada kebijakan penerimaan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Provinsi Papua Tahun 2021, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Provinsi Papua Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.1.
PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	%
		APBD 2021	RAPBD-P 2021		
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.765.651.609.757,00	1.977.739.632.899,00	212.088.023.142,00	12,01
4.1.1	Pajak Daerah	1.398.183.395.930,00	1.578.579.784.411,00	180.396.388.481,00	12,90
4.1.2	Retribusi Daerah	27.714.487.808,00	15.907.965.500,00	-11.806.522.308,00	-42,60
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.304.838.272,00	39.602.995.241,00	14.298.156.969,00	56,50
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	314.448.887.747,00	343.648.887.747,00	29.200.000.000,00	9,29

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	%
		APBD 2021	RAPBD-P 2021		
1	2	3	4	5	6
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	12.996.594.419.000,00	12.696.321.096.000,00	-300.273.323.000,00	-2,31
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	12.996.594.419.000,00	12.696.321.096.000,00	-300.273.323.000,00	-2,31
4.2.1.1	Dana Perimbangan				
	a. Dana Transfer Umum	3.074.972.713.000,00	2.998.378.853.000,00	-76.593.860.000,00	-2,49
	- DBH	683.458.786.000,00	683.458.786.000,00	0,00	0,00
	- DAU	2.391.513.927.000,00	2.314.920.067.000,00	-76.593.860.000,00	-3,20
	b. Dana Transfer Khusus	1.819.099.681.000,00	1.770.420.218.000,00	-48.679.463.000,00	-2,68
	- DAK Fisik	422.868.900.000,00	374.189.437.000,00	-48.679.463.000,00	-11,51
	- DAK Non Fisik	1.396.230.781.000,00	1.396.230.781.000,00	0,00	0,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	15.684.418.000,00	15.684.418.000,00	0,00	0,00
4.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	5.464.079.464.000,00	5.289.079.464.000,00	-175.000.000.000,00	-3,20
4.2.1.4	Dana Tambahan Infrastruktur	2.622.758.143.000,00	2.622.758.143.000,00	0,00	0,00
4.2.2	Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
4.3.2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	14.763.746.028.757,00	14.675.560.728.899,00	-88.185.299.858,00	-0,60
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAN				
6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	1.115.218.333.573,00	3.021.796.714.740,00	1.906.578.381.167,00	170,96
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.115.218.333.573,00	3.021.796.714.740,00	1.906.578.381.167,00	170,96
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	995.218.333.573,00	2.901.796.714.740,00	1.906.578.381.167,00	191,57
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL APBD	15.878.964.362.330,00	17.697.357.443.639,00	1.818.393.081.309,00	11,45

Rincian Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun 2021, diuraikan sebagai berikut :

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021**

a. Pendapatan Asli Daerah diperkirakan mengalami kenaikan 12,01 persen atau kumulatif sebesar Rp.212.088.023.142,00 dari semula sebesar Rp.1.765.651.609.757,00 menjadi sebesar Rp.1.977.739.632.899,00. Dasar perhitungan penetapan target, adalah realisasi PAD yang dapat diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2021 disamping melihat kecenderungan dan dinamika ekonomi Papua dalam satu tahun kedepan.

1. Pendapatan Pajak Daerah diperkirakan mengalami kenaikan 12,90 persen atau sebesar Rp.180.396.388.481,00 dari semula sebesar Rp.1.398.183.395.930,00 menjadi sebesar Rp.1.578.579.784.411,00; Hasil Retribusi Daerah mengalami penurunan 42,60 persen atau sebesar Rp.11.806.522.308,00 dari semula sebesar Rp.27.714.487.808,00 menjadi sebesar Rp.15.907.965.500,00;
2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diperkirakan mengalami kenaikan 56,50 persen atau sebesar Rp.14.298.156.969,00 dari semula sebesar Rp.25.304.838.272,00 menjadi sebesar Rp.39.602.995.241,00;
3. Lain-Lain PAD Yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan 9,29 persen atau sebesar Rp.29.200.000.000,00 dari semula sebesar Rp.314.448.887.747,00 menjadi sebesar Rp.343.648.887.747,00.

b. Pendapatan Transfer mengalami penurunan 0,96 persen atau sebesar Rp125.273.323.000,00 dari semula sebesar Rp12.996.594.419,00 menjadi sebesar Rp12.696.321.096.000,00.

1. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak tidak mengalami perubahan, atau tetap sebesar Rp.683.458.786.000,00;
2. Dana Alokasi Umum berkurang sebesar Rp.76.593.860.000,00 atau 3,20 persen dari semula sebesar Rp.2.391.513.927.000,00 menjadi sebesar Rp.2.314.920.067.000,00;
3. Dana Alokasi Khusus berkurang sebesar Rp.48.679.463.000,00 atau 2,68 persen dari semula sebesar Rp.1.819.099.681.000,00 menjadi sebesar Rp.1.770.420.218.000,00.
4. Dana Insentif Daerah tidak mengalami perubahan, atau tetap sebesar Rp.15.684.418.000,00;

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021**

5. Dana Otonomi Khusus berkurang sebesar Rp.175.000.000.000,00 atau 3,20 persen dari semula sebesar Rp.5.464.079.464.000,00 menjadi sebesar Rp.5.289.079.464.000,00.
6. Dana Tambahan Infrastruktur tidak mengalami perubahan, atau tetap sebesar Rp.2.622.758.143.000,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan, atau tetap sebesar Rp.1.500.000.000,00. terdiri dari :

1. Pendapatan Hibah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 tidak mengalami perubahan, atau tetap sebesar Rp1.500.000.000,00;

2.2. RENCANA PERUBAHAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sesuai dengan proyeksi pendapatan dan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 ini, penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA) adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan 170,96 persen atau sebesar Rp.1.906.578.381.167,00 dari semula sebesar Rp.1.115.218.333.573,00 menjadi sebesar Rp3.021.796.714.740,00;
2. Pengeluaran Pembiayaan tidak mengalami perubahan, atau tetap sebesar Rp.120.000.000.000,00;
3. Dari uraian setelah perubahan pada pos penerimaan pembiayaan sebesar Rp.3.021.796.714.740,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.120.000.000.000,00, sehingga terjadi perubahan pada pos pembiayaan Netto, atau sebesar Rp.2.901.796.714.740,00.

BAB III

PRORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN BELANJA MASING-MASING URUSAN, SKPD, DAN PROGRAM/KEGIATAN.

3.1. PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas belanja daerah diarahkan dalam pendekatan "*Tematik, Holistic, Integrative, dan Sparsial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program*", yakni sejumlah program prioritas yang telah ditentukan berdasarkan isu dan permasalahan pembangunan dengan memastikan program yang dialokasikan bermanfaat, sehingga tema "*Pemulihan Kehidupan Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Hidup dan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan*" dapat tercapai pada tahun rencana 2021, dengan tetap memperhatikan fokus pembangunan tahun 2021.

Prioritas belanja daerah berdasarkan kebijakan perencanaan belanja daerah sebagai berikut :

1. Pembiayaan pelayanan bidang pendidikan minimal 30% (tiga puluh perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya untuk membiayai penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sembilan tahun, pendidikan menengah, pendidikan non formal, dan pendidikan tinggi;
2. Pembiayaan pelayanan bidang kesehatan minimal 15% (lima belas perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses kesehatan bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi masyarakat, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, dan pelayanan kesehatan dalam situasi bencana;
3. Pembiayaan pengembangan ekonomi kerakyatan minimal 25% (dua puluh lima perseratus) yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan pemerataan ekonomi bagi Orang Asli Papua, dengan penganggarnya dialokasikan untuk pembentukan dan pembinaan peran dan fungsi lembaga profesi untuk pengembangan usaha kecil/mikro, perkreditan usaha ekonomi rakyat, subsidi harga kebutuhan bahan pokok, dan pengembangan komoditas unggulan;

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021**

4. Pembiayaan pembangunan infrastruktur minimal 20% (dua puluh perseratus) yang dialokasikan untuk pembangunan prasarana perumahan rakyat, penerangan, air bersih dan telekomunikasi;
 5. Pembiayaan bantuan afirmasi kepada lembaga keagamaan, lembaga masyarakat adat asli, dan kelompok perempuan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 6% (enam perseratus);
 6. Pembiayaan perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan program dan kegiatan yang penganggarnya dialokasikan maksimal 2 % (dua perseratus); dan
- Pembiayaan program prioritas selain yang disebutkan di atas, dialokasikan maksimal 2% (dua perseratus).

3.2. RENCANA BELANJA DAERAH

Belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan dari sisi struktur belanja sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021 dimana Belanja sudah tidak ada lagi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, berubah menjadi Belanja. Selanjutnya, belanja dibagi kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Struktur belanja dapat dilihat pada tabel 3.1.

Secara keseluruhan jumlah belanja daerah diperkirakan terjadi kenaikan sebesar Rp.1.818.393.081.309,00 atau 11,54 persen, dari semula sebesar Rp.15.758.964.362.330,00 menjadi sebesar Rp.17.577.357.443.639,00 pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021.

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021**

TABEL 3.2.1.

**BELANJA DAERAH PRIORITAS PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		APBD 2021	RAPBD-P 2021		
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	11.478.415.041.575,00	13.079.918.634.773,00	1.970.657.205.488,00	17,17
5.1.1	Belanja Pegawai	4.262.598.475.082,00	4.196.529.811.863,00	-66.068.663.219,00	-1,55
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.171.551.173.244,00	4.952.518.043.380,00	780.966.870.136,00	18,72
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
5.1.5	Belanja Hibah	2.943.998.856.688,00	3.776.027.270.088,00	832.028.413.400,00	28,26
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	100.266.536.561,00	154.593.509.442,00	54.326.972.881,00	54,18
5.2	BELANJA MODAL	1.244.687.958.046,00	1.429.264.764.191,00	184.576.806.145,00	14,83
5.2.1	Belanja Modal Tanah	26.157.500.000,00	60.229.859.070,00	34.072.359.070,00	130,26
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.294.843.060,00	228.634.860.956,00	16.340.017.896,00	7,70
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	825.825.134.362,00	938.313.172.353,00	112.488.037.991,00	13,62
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	162.897.169.367,00	199.223.121.812,00	36.325.952.445,00	22,30
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.275.752.500,00	2.563.750.000,00	-712.002.500,00	-21,74
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	14.237.558.757,00	300.000.000,00	-13.937.558.757,00	-97,89
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	0,00	0,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	2.885.861.362.709,00	2.918.174.044.675,00	32.312.681.966,00	1,12
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	767.987.401.259,00	859.955.064.748,00	91.967.663.489,00	11,98
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	2.117.873.961.450,00	2.058.218.979.927,00	-59.654.981.523,00	-2,82
	Jumlah Belanja	15.758.964.362.330,00	17.577.357.443.639,00	1.818.393.081.309,00	11,54
	Total Surplus/ (Defisit)	-995.218.333.573,00	-2.901.796.714.740,00	-1.906.578.381.167,00	191,57

a. **Belanja Operasi** mengalami kenaikan 13,95 persen, atau sebesar Rp.1.601.503.593.198,00 dari semula sebesar Rp.11.478.415.041.575,00 menjadi sebesar Rp.13.079.918.634.773,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai mengalami penurunan 1,55 persen, atau sebesar Rp.66.068.663.219,00 dari semula sebesar Rp.4.262.598.475.082,00 menjadi sebesar Rp.4.196.529.811.863,00;
2. Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan 18,72 persen, atau sebesar Rp.780.966.870.136,00 dari semula sebesar Rp.4.171.551.173.244,00 menjadi sebesar Rp.4.952.518.043.380,00;
3. Belanja Subsidi pada APBD Induk tidak dianggarkan, namun pada Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp.250.000.000,00;
4. Belanja Hibah mengalami kenaikan 28,26 persen, atau sebesar Rp.832.028.413.400,00 dari semula sebesar Rp.2.943.998.856.688,00 menjadi sebesar Rp.3.776.027.270.088,00;
5. Belanja Bantuan Sosial mengalami kenaikan 54,18 persen, atau sebesar Rp.54.326.972.881,00 dari semula sebesar Rp.100.266.536.561,00 menjadi sebesar Rp.154.593.509.442,00.

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021**

b. Belanja Modal mengalami kenaikan 14,83 persen, atau sebesar Rp.184.576.806.145,00 dari semula sebesar Rp.1.244.687.958.046,00 menjadi sebesar Rp.1.429.264.764.191,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah bertambah 130,26 persen, atau sebesar Rp.34.072.359.070,00 dari semula sebesar Rp.26.157.500.000,00 menjadi sebesar Rp.60.229.859.070,00;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah 7,70 persen, atau sebesar Rp.16.340.017.896,00 dari semula sebesar Rp.212.294.843.060,00 menjadi sebesar Rp.228.634.860.956,00;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan bertambah 13,62 persen, atau sebesar Rp.112.488.037.991,00 dari semula sebesar Rp.825.825.134.362,00 menjadi sebesar Rp.938.313.172.353,00;
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi bertambah 22,30 persen, atau sebesar Rp.36.325.952.445,00 dari semula sebesar Rp.162.897.169.367,00 menjadi sebesar Rp.199.223.121.812,00;
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berkurang 21,74 persen, atau sebesar Rp.712.002.500,00 dari semula sebesar Rp.3.275.752.500,00 menjadi sebesar Rp.2.563.750.000,00;
6. Belanja Modal Aset Lainnya berkurang 97,89 persen, atau sebesar Rp.13.937.558.757,00 dari semula sebesar Rp.14.237.558.557,00 menjadi sebesar Rp.300.000.000,00.

c. Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan, atau sebesar Rp.150.000.000.000,00

d. Belanja Transfer pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 bertambah 1,12 persen, atau sebesar Rp.32.312.681.966,00 dari semula sebesar Rp.2.885.861.362.709,00 menjadi sebesar Rp.2.918.174.044.675,00, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Bagi Hasil bertambah 11,98 persen, atau sebesar Rp.91.967.663.489,00 dari semula sebesar Rp.767.987.401.259,00 menjadi sebesar Rp.859.955.064.748,00;
2. Belanja Bantuan Keuangan berkurang 2,82 persen, atau sebesar Rp.59.654.981.523,00 dari semula sebesar Rp.2.117.873.961.450,00 menjadi sebesar Rp.2.058.218.979.927,00.

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021**

TABEL 3.2.2.

**PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA DAERAH SEMENTARA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PER URUSAN PADA PERUBAHAN RAPBD
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Perangkat Daerah	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH /(BERKURANG)
		Nilai	Nilai	
1	2	3	4	5= (3 - 4)
1.01.2.23.2.24.01.0000	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah	1.371.889.659.599	1.409.754.693.160	37.865.033.561
1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan	193.844.141.008	198.844.699.639	5.000.558.631
1.02.0.00.0.00.01.0004	Rumah Sakit Jiwa	82.038.895.305	84.070.359.311	2.031.464.006
1.02.0.00.0.00.01.01	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura	472.889.579.699	474.959.579.035	2.069.999.336
1.02.0.00.0.00.01.02	Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura (BLUD)	88.455.944.200	98.455.944.200	10.000.000.000
1.02.0.00.0.00.01.03	Rumah Sakit Umum Daerah Abepura	220.621.784.731	223.476.784.731	2.855.000.000
1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.896.807.579.335	2.060.393.179.335	163.585.600.000
1.05.0.00.0.00.05.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana Daerah	60.472.678.949	61.472.666.994	999.988.045
1.06.2.08.2.12.07.00	Dinas Sosial, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	53.849.503.853	66.300.462.918	12.450.959.065
2.07.2.17.3.30.01.00	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	93.263.417.829	103.285.329.676	10.021.911.847
2.09.3.27.0.00.01.00	Dinas Pertanian dan Pangan	127.896.951.391	133.946.657.718	6.049.706.327
2.11.3.28.0.00.02.00	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	186.313.159.315	195.358.104.472	9.044.945.157
2.11.3.28.0.00.02.0001	Cabang Dinas Kehutanan Jayapura	1.499.976.880	2.799.894.930	1.299.918.050
2.11.3.28.0.00.02.0002	Cabang Dinas Kehutanan Sarmi	749.787.500	749.787.500	-
2.11.3.28.0.00.02.0003	Cabang Dinas Kehutanan Keerom	1.000.000.000	1.500.000.000	500.000.000
2.11.3.28.0.00.02.0004	Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Raya	599.949.000	599.949.000	-
2.11.3.28.0.00.02.0005	Cabang Dinas Kehutanan Nabire	749.850.000	749.850.000	-
2.11.3.28.0.00.02.0006	Cabang Dinas Kehutanan Mimika	1.049.989.224	1.049.989.224	-
2.11.3.28.0.00.02.0007	Cabang Dinas Kehutanan Asmat	599.598.525	599.598.525	-
2.11.3.28.0.00.02.0008	Cabang Dinas Kehutanan Mappi	599.985.000	599.985.000	-
2.11.3.28.0.00.02.0009	Cabang Dinas Kehutanan Merauke	1.099.824.000	1.099.824.000	-
2.11.3.28.0.00.02.0010	Cabang Dinas Kehutanan Boven Digoel	599.989.075	599.989.075	-
2.11.3.28.0.00.02.0011	Cabang Dinas Kehutanan Yalimo	400.000.000	400.000.000	-
2.11.3.28.0.00.02.0012	Cabang Dinas Kehutanan Yahukimo	599.998.840	599.998.840	-
2.11.3.28.0.00.02.0013	Cabang Dinas Kehutanan Dogiyai-Deyai	599.968.318	599.968.318	-
2.11.3.28.0.00.02.0014	Cabang Dinas Kehutanan Intan Jaya	599.598.055	599.598.055	-
2.11.3.28.0.00.02.0015	Cabang Dinas Kehutanan Mamberamo Tengah	598.896.000	598.896.000	-
2.11.3.28.0.00.02.0016	Cabang Dinas Kehutanan Paniai	599.552.124	635.552.124	36.000.000
2.11.3.28.0.00.02.0017	Cabang Dinas Kehutanan Tolikara	499.961.470	499.961.470	-
2.11.3.28.0.00.02.0018	Cabang Dinas Kehutanan Puncak Jaya	499.935.000	499.935.000	-
2.11.3.28.0.00.02.0019	Cabang Dinas Kehutanan Puncak	500.000.000	500.000.000	-

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Perangkat Daerah	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	BERTAMBAH /(BERKURANG)
		Nilai	Nilai	
1	2	3	4	5= (3 - 4)
2.11.3.28.0.00.02.0020	KPHL UNIT II NABIRE	500.000.000	500.000.000	-
2.11.3.28.0.00.02.0021	KPHL Unit VI Mimika	1.050.000.000	1.050.000.000	-
2.11.3.28.0.00.02.0022	KPHP Unit XVII Waropen	499.780.000	499.780.000	-
2.11.3.28.0.00.02.0023	KPHP Unit XXI Lintas Sarmi Mamberamo Raya	697.975.000	697.971.000	(4.000)
2.11.3.28.0.00.02.0024	KPHP Unit XXIII Sarmi	699.987.500	699.987.500	-
2.11.3.28.0.00.02.0025	KPHP Unit XIX Kepulauan Yapen	500.000.000	500.000.000	-
2.11.3.28.0.00.02.0026	KPHL Unit XX Biak	1.949.899.400	1.949.899.400	-
2.11.3.28.0.00.02.0027	KPHP Unit XXVIII Kota Jayapura	1.249.994.500	2.144.975.750	894.981.250
2.11.3.28.0.00.02.0028	KPHP Unit XXIX Keerom	866.899.450	866.899.450	-
2.11.3.28.0.00.02.0029	KPHL Unit XXXV Pegunungan Bintang	499.743.735	499.743.735	-
2.11.3.28.0.00.02.0030	KPHL Unit XLII A Jayawijaya	1.999.999.485	1.999.999.485	-
2.11.3.28.0.00.02.0031	KPHL Unit XLII B Lanny Jaya	600.000.000	600.000.000	-
2.11.3.28.0.00.02.0032	KPHP Unit XLIII Nduga	500.000.000	500.000.000	-
2.11.3.28.0.00.02.0033	KPHP Unit LIII Boven Digoel	499.999.834	499.999.834	-
2.11.3.28.0.00.02.0034	UPTD Kebun Raya Koya Koso	1.500.000.000	1.750.000.000	250.000.000
2.11.3.28.0.00.02.0035	BPTH Papua	1.904.897.766	1.904.897.766	-
2.11.3.28.0.00.02.0036	UPTD Taman Burung dan Taman Angrek	1.499.988.500	1.499.988.500	-
2.11.3.28.0.00.02.0037	UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Papua	1.499.997.999	1.499.997.999	-
2.13.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua	28.217.400.926	32.692.358.296	4.474.957.370
2.15.2.15.2.15.15.0000	Dinas Perhubungan	91.178.585.478	91.383.572.868	204.987.390
2.16.2.20.2.21.04.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	44.023.317.160	49.066.747.780	5.043.430.620
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.835.008.110	26.319.008.110	1.484.000.000
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Olah Raga dan Pemuda	196.056.488.794	301.056.488.794	105.000.000.000
2.22.3.26.0.00.03.00	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	48.216.677.885	49.216.633.317	999.955.432
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	54.760.481.426	58.360.480.051	3.599.998.625
3.29.0.00.0.00.01.00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	89.984.651.218	91.744.651.218	1.760.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	1.018.544.547.060	1.409.417.347.060	390.872.800.000
4.01.0.00.0.00.01.0001	Biro Umum dan Protokol	119.268.266.080	142.807.265.975	23.538.999.895
4.01.0.00.0.00.01.0012	Biro Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	31.240.830.110	51.710.832.474	20.470.002.364
4.01.0.00.0.00.01.002	Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus	33.052.523.121	34.582.498.988	1.529.975.867
4.01.0.00.0.00.01.004	Biro Hukum	179.250.146.823	179.250.083.251	(63.572)
4.01.0.00.0.00.01.005	Biro Organisasi	16.182.012.060	17.681.012.060	1.499.000.000
4.02.0.00.0.00.03.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua	474.784.475.630	590.509.475.630	115.725.000.000
4.02.0.00.0.00.05.00	Sekretariat Majelis Rakyat Papua	234.351.885.000	259.351.884.999	24.999.999.999
5.01.5.05.1.03.02.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	136.552.171.670	154.642.171.670	18.090.000.000
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	7.691.262.882.136	8.503.695.519.378	812.432.637.242
5.02.0.00.0.00.02.0001	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah			-
5.02.0.00.0.00.03.00	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	137.339.301.311	140.302.815.628	2.963.514.317
5.03.0.00.0.00.02.0000	Badan Kepegawaian Daerah	46.027.819.754	51.895.669.754	5.867.850.000
5.04.0.00.0.00.01.00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	48.194.634.473	49.429.634.473	1.235.000.000
5.06.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Perbatasan dan Kerja Sama	21.630.189.334	27.810.189.334	6.180.000.000
5.07.0.00.0.00.01.0000	Badan Penghubung Daerah	13.769.964.110	15.954.957.610	2.184.993.500
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	81.967.910.334	83.577.910.334	1.610.000.000
8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.962.874.933	19.632.855.918	1.669.980.985
TOTAL		15.758.964.362.333	17.577.357.443.639	1.818.393.081.306

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021**

Terkait dengan Rincian Prioritas Plafon Anggaran Belanja sementara pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang dibagi per urusan, Program/Kegiatan pada masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, terdapat pada **lampiran ini**.

**BAB IV
PENUTUP**

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021, ini disusun untuk dibahas dan disepakati bersama, sebagai dasar Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2021.

Jayapura, September 2021

GUBERNUR PAPUA

LUKAS ENEMBE, S.IP., MH

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021**

**LAMPIRAN KOMPOSISI
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021**

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.765.651.609.757,00	1.977.739.632.899,00	212.088.023.142,00	12,01
4.1.1	Pajak Daerah	1.398.183.395.930,00	1.578.579.784.411,00	180.396.388.481,00	12,90
4.1.2	Retribusi Daerah	27.714.487.808,00	15.907.965.500,00	-11.806.522.308,00	-42,60
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.304.838.272,00	39.602.995.241,00	14.298.156.969,00	56,50
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	314.448.887.747,00	343.648.887.747,00	29.200.000.000,00	9,29
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	12.996.594.419.000,00	12.696.321.096.000,00	-300.273.323.000,00	-2,31
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	12.996.594.419.000,00	12.696.321.096.000,00	-300.273.323.000,00	-2,31
4.2.1.1	Dana Perimbangan				
	a. Dana Transfer Umum	3.074.972.713.000,00	2.998.378.853.000,00	-76.593.860.000,00	-2,49
	- DBH	683.458.786.000,00	683.458.786.000,00	0,00	0,00
	- DAU	2.391.513.927.000,00	2.314.920.067.000,00	-76.593.860.000,00	-3,20
	b. Dana Transfer Khusus	1.819.099.681.000,00	1.770.420.218.000,00	-48.679.463.000,00	-2,68
	- DAK Fisik	422.868.900.000,00	374.189.437.000,00	-48.679.463.000,00	-11,51
	- DAK Non Fisik	1.396.230.781.000,00	1.396.230.781.000,00	0,00	0,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	15.684.418.000,00	15.684.418.000,00	0,00	100,00
4.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	5.464.079.464.000,00	5.289.079.464.000,00	-175.000.000.000,00	-3,20
4.2.1.4	Dana Tambahan Infrastruktur	2.622.758.143.000,00	2.622.758.143.000,00	0,00	0,00
4.2.2	Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	14.763.746.028.757,00	14.675.560.728.899,00	-88.185.299.858,00	-0,60
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	11.478.415.041.575,00	13.079.918.634.773,00	1.601.503.593.198,00	13,95
5.1.1	Belanja Pegawai	4.262.598.475.082,00	4.196.529.811.863,00	-66.068.663.219,00	-1,55
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.171.551.173.244,00	4.952.518.043.380,00	780.966.870.136,00	18,72
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
5.1.5	Belanja Hibah	2.943.998.856.688,00	3.776.027.270.088,00	832.028.413.400,00	28,26
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	100.266.536.561,00	154.593.509.442,00	54.326.972.881,00	54,18
5.2	BELANJA MODAL	1.244.687.958.046,00	1.429.264.764.191,00	184.576.806.145,00	14,83
5.2.1	Belanja Modal Tanah	26.157.500.000,00	60.229.859.070,00	34.072.359.070,00	130,26
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	212.294.843.060,00	228.634.860.956,00	16.340.017.896,00	7,70
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	825.825.134.362,00	938.313.172.353,00	112.488.037.991,00	13,62
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	162.897.169.367,00	199.223.121.812,00	36.325.952.445,00	22,30
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.275.752.500,00	2.563.750.000,00	-712.002.500,00	-21,74
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	14.237.558.757,00	300.000.000,00	-13.937.558.757,00	-97,89
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	0,00	0,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	0,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	2.885.861.362.709,00	2.918.174.044.675,00	32.312.681.966,00	1,12
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	767.987.401.259,00	859.955.064.748,00	91.967.663.489,00	11,98
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	2.117.873.961.450,00	2.058.218.979.927,00	-59.654.981.523,00	-2,82
	Jumlah Belanja	15.758.964.362.330,00	17.577.357.443.639,00	1.818.393.081.309,00	11,54
	Total Surplus/ (Defisit)	-995.218.333.573,00	-2.901.796.714.740,00	-1.906.578.381.167,00	191,57
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
6.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	1.115.218.333.573,00	3.021.796.714.740,00	1.906.578.381.167,00	170,96
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	1.115.218.333.573,00	3.021.796.714.740,00	1.906.578.381.167,00	170,96
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	995.218.333.573,00	2.901.796.714.740,00	1.906.578.381.167,00	191,57
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APBD	15.878.964.362.330,00	17.697.357.443.639,00	1.818.393.081.309,00	11,45